BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan aspek penting dari demokrasi, karena fungsi strategis yang dimilikinya seperti (1) partisipasi politik berfungsi untuk mendukung program politik dan program pembangunan, (2) partisipasi politik berfungsi sebagaai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, dan (3) partisipasi politik berfungsi sebagai sarana memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Handaningrum & Rini, 2014).

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tetapi dalam kenyataannya jumlah warga negara yang berpartisipasi dari negara satu dengan negara lainnya berbeda. Terdapat fenomena warga negara yang tidak ikut serta dalam proses politik (Wahyudi, dkk., 2013).

Tingkat partisipasi politik yang tinggi dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah atau lembaga publik lainnya sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (Wahyudi, dkk., 2013). Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi politik juga menunjukkan legitimasi yang rendah pula (Budiardjo, 2018).

Secara khusus di Indonesia, tingkat partisipasi politik dapat dilihat dari pemberian suara dalam pemilu. Tingkat partisipasi pemilih di Indonesia tidaklah sama dari satu pemilu dengan pemilu lainnya. Menurut data KPU, partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 berjumlah 72 persen, dimana tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat partisipasi pada Pemilu 2009. Untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, rata-rata tingkat partisipasi nasional sebesar 72 persen dan termasuk kategori cukup tinggi. Penghitungan tersebut dilakukan terhadap empat kategori pemilih yang terdiri atas (1) jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), (2) jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), (3) jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan (4) jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP dan KK/ nama sejenis lainnya. Dari empat kategori tersebut untuk Data DPR dari 77 Daerah Pemilihan jumlah pemilihnya sebanyak 189.227.784. Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 77 Daerah Pemilihan berjumlah 136.801.359 sehingga hasil perbandingannya, tingkat pemilih yang hadir dan menggunakan suara sebanyak 72 persen. Angka partisipasi ini masih tergolong tinggi, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan oleh KPU sebesar 75 persen (Nurhasim, 2014) (Gambar 1.01.).

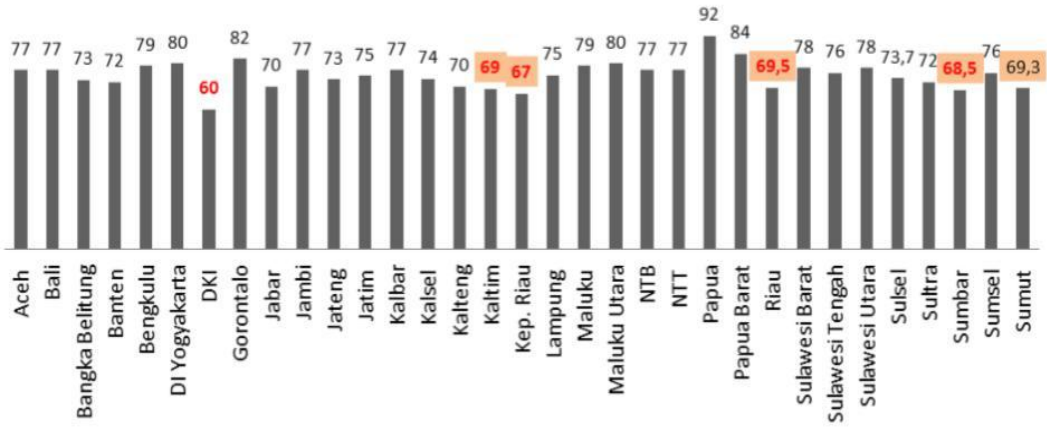

Gambar 1.1.
Tingkat Partisipasi Pemilih dalam
Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 (Nurhasim, 2014)

Sementara angka partisipasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tingkat nasional lebih rendah dari angka partisipasi Pileg 2014, yaitu sebesar 69,58 persen. Angka partisipasi ini juga meleset dari target KPU yang ditetapkan sebesar 75 persen. Angka partisipasi Pilres di tingkat daerah juga lebih rendah dibandingkan angka partisipasi Pileg di tingkat daerah (Nurhasim, 2014) (Gambar 1.2).

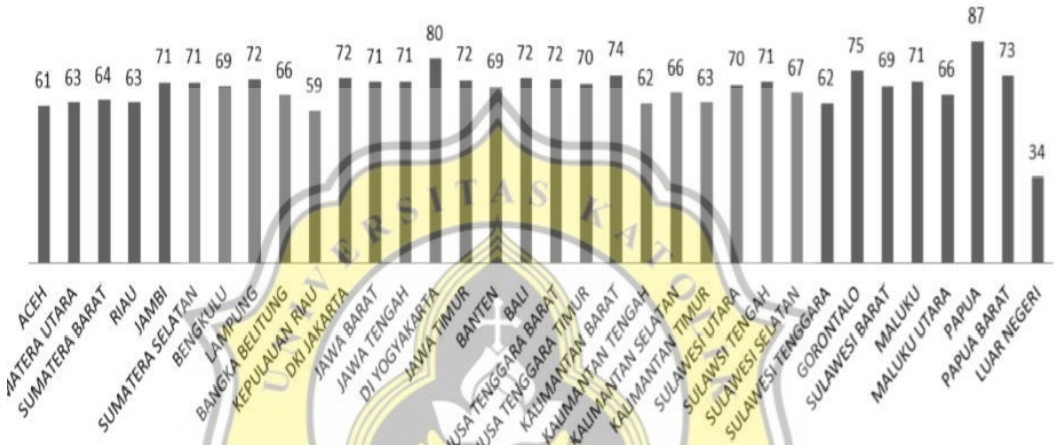

Gambar 1.2
Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan
Presiden (Pilpres) 2014 (Nurhasim, 2014)

Tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Jawa Tengah pada Pileg 2014 cukup tinggi yaitu sebesar 73,24 persen, namun terdapat daerah yang tingkat partisipasi pemilih rendah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang dengan angka partisipasi pemilih di bawah 65 persen. Selain itu, untuk tingkat partisipasi pemilihan Pilpres 2014 juga mengalami penurunan dengan angka partisipasi sebesar 71,25 persen. Penurunan tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah Jawa Tengah. Angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Pileg dan Pilres 2014 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubenur (Pilgub) 2013 yaitu sebesar 58,46 persen (Yanuarti, 2014) (Gambar 1.3).

Gambar 1. 3.
Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub 2013, Pileg dan Pilpres 2014 di Provinsi Jawa Tengah (Yanuarti, 2014)

Partisipasi pemilih Pilgub di Provinsi Jawa Tengah 2018 sebesar 73,19 persen, dimana angka tersebut meningkat dibandingkan Pilgub 2013 namun nilai tidak sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 77,5 persen (Nugroho, 2013 dan Winarso, 2018). Secara khusus di Kota Semarang angka partisipasi pemilih Pilgub 2018 juga meningkat jika dibandingkan tahun 2013. Angka partisipasi pemilih di Kota Semarang pada Pilgub 2013 sebesar 61 persen dan meningkat menjadi 72,80 persen di tahun 2018 (Winarso, 2018). Angka partisipasi pemilih di Kota Semarang pada Pilgub 2018 meski meningkat dibandingkan tahun 2013, namun angkanya masih dibawah angka partisipasi pemilih tingkat provinsi.

Selain pemberian suara, rendahnya partisipasi politik di Indonesia juga tampak dari sedikitnya jumlah masyarakat yang mendiskusikan perkembangan politik (diskusi informal) atau bersedia menghadiri diskusi politik secara formal (seperti talkshow, seminar, atau diskusi panel). Masyarakat yang suka berdiskusi mengenai politik, umumnya individu-individu yang memiliki minat politik yang tinggi (Saputra, 2017). Lake & Huckfeldt (Boeckmann & Tyler, 2002)

mengemukakan bahwa keterlibatan sipil (yang diindikasikan dengan jumlah peserta diskusi kelompok) berkaitan dengan partisipasi politik.

Secara khusus, mahasiswa pada umumnya termasuk kategori pemula atau pemilih muda, dimana memiliki jumlah yang relatif besar sehingga tidak menjadi sasaran utama dari peserta pemilu dan para calon kandidatnya (Wardhani, 2018). Selain itu, mahasiswa sebagai kelompok cendekia diharapkan memberikan kontribusi dalam pembangunan berupa keterlibatan (partisipasi politik). Hal ini mengacu pada pendapat Sastroatmodjo (Wardhani, 2018) pentingnya mengkaji partisipasi politik pada pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan, khususnya dalam pemberian suara di pilkada atau pilpres.

Adanya indikasi tingkat partisipasi politik di Indonesia cenderung rendah, termasuk mahasiswa (yang umumnya pemilih pemula) mendorong perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkannya dengan mengindentifikasi faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Menurut Nurhasim (2014), partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepercayaan politik, insentif, mobilisasi, dan sistem politik. Penelitian ini difokuskan pada kepercayaan politik karena karena kaitannya dengan berbagai hal seperti peningkatan angka partisipasi publik di ranah politik, persetujuan terhadap pengeluaran dana oleh pemerintah, dukungan secara umum terhadap kebijakan pemerintah, partisipasi umum, dan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, kepercayaan politik juga berkaitan erat dengan kepuasan warga negara terhadap pemerintahannya dan menunjukkan kualitas dari suatu sistem demokrasi (Wahyudi, dd., 2017). Kepercayaan politik menurut Mangun (Matulessy & Samsul, 2013) merupakan faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan psikologis individu dalam politik.

Fukuyama (*Committe of Experts on Public Administration*, 2015) juga mengemukakan bahwa kepercayaan politik telah diidentifikasi sebagai salah satu fondasi terpenting di mana legitimasi dan keberlanjutan sistem politik dibangun. Kepercayaan sangat penting untuk kohesi sosial dan kesejahteraan karena memengaruhi kemampuan pemerintah untuk memerintah dan memungkinkan pemerintah untuk bertindak tanpa harus menggunakan paksaan.

Kepercayaan politik menunjukkan adanya suatu keyakinan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan individu atau publik. Individu yang memiliki kepercayaan politik akan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik. Hal tersebut menurut Gamson (Wahyudi, dkk., 2013) ditunjukkan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik yang berdampak terhadap turunnya partisipasi masyarakat lembaga politik berdampak turunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Nurhasim (2014) mengungkapkan kepercayaan politik yang tinggi ditunjukkan dengan keaktifan, sedangkan kepercayaan politik yang rendah ditunjukkan dengan ekspresi ketidakpercayaan atau kekecewaan terhadap suatu sistem politik yang ada. Selain itu, kepercayaan politik yang rendah juga ditunjukkan dengan adanya persepsi negatif dari masyarakat mengenai ideologi partai politik yang kurang kuat atau berbagai permasalahan oknum anggota partai politik yang menurunkan citra partai politik di masyarakat (Januarti, 2016).

Šerek & Macek (2014) mengungkapkan kepercayaan politik yang rendah diindikasikan adanya persepsi korupsi di lingkungan politik, keterasingan politik (*political alienation*), dan praktik politik yang tidak bermoral. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra (Handaningrum & Rini, 2014) juga mengungkapkan adanya fenomena terkait turunnya kepercayaan politik pada

masyarakat, yang diindikasikan dengan banyakya pemberitaan media atas citra negatif partai politik, banyaknya kasus korupsi yag menyeret kalangan elit partai politik, dan kegagalan partai politik memenuhi janji-janjinya dalam pemilu sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Handaningrum & Rini (2014) bahwa tingkat kepercayaan politik pada mahasiswa rendah, yang diindikasikan dengan adanya persepsi negatif mengenai sikap terhadap partai politik, sikap terhadap politisi, sikap terhadap menteri dan lembaga kementerian, sikap terhadap DPR, sikap terhadap presiden, dan sikap terhadap berita politik.

Fenomena rendahnya kepercayaan politik pada masyarakat juga ditunjukkan dengan masih tingginya golput dengan alasan (1) tidak ada calon legislatif yang cukup baik untuk mewakili kepentingan rakyat, (2) legislatif yang terpilih tidak mampu berbuat banyak untuk mengubah kehidupan masyarakat, dan (3) dari sekian banyak legislatif masih banyak wajah-wajah lama yang reputasinya kurang baik di masyarakat. Alasan-alasan tersebut menunjukkan adanya sikap apatis dari masyarakat atau rendahnya kepercayaan politik pada masyarakat (Evelina & Angeline, 2015).

Hasil penelitian Akhrani, dkk (2018) mengungkapkan adanya hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan politik maka semakin tinggi pula partisipasi politik. Sementara, hasil penelitian Handaningrum & Rini (2014) mengungkapkan tidak adanya hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik. Dalam penelitian tersebut, tingginya partisipasi politik pada masyarakat ternyata tidak adanya hubungannya dengan rendahnya kepercayaan politik pada masyarakat. Beberapa hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik.

Hasil survei identifikasi masalah terhadap lima orang mahasiswa pada hari Senin, 6 Agustus 2018, di sebuah PTS di Semarang mengungkapkan sikap apatis terhadap pilkada atau pilpres (tiga orang), sementara yang lainnya cukup antusias untuk mengikutinya. Hasil survei tersebut juga mengungkapkan rendahnya minat mahasiswa untuk berdiskusi baik formal maupun informal mengenai politik. Para mahasiswa tersebut, hanya berbicara politik jika ada yang memulainya, bahkan orang yang mengajak berbicara adalah orang yang dihormati seperti dosen. Selain itu, ada seorang mahasiswa yang segera mengakhiri pembicaraan jika sudah mengarah politik. Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa kelima mahasiswa tersebut tidak mau mengikuti kampanye, namun dua orang bersedia melihat debat kandidat di TV.

Hasil survei identifikasi masalah terhadap kelima orang tersebut juga mengungkapkan adanya keragu-raguan terhadap calon pilpres. Misalnya satu orang mahasiswa mengungkapkan meski dirinya melihat pembangunan infrastruktur di era Jokowi tampak masif, namun jumlah utang negara yang semakin tinggi, kurs rupiah yang saat ini semakin melemah, dan banyaknya kasus-kasus teroris membuat dirinya kurang percaya. Sementara mahasiswa lainnya mengungkapkan bahwa sikapnya yang apatis terhadap pilkada atau pilpres karena tidak yakin dengan partai-partai yang mengusung Jokowi. Hasil tersebut menunjukkan adanya variasi kepercayaan politik dari kelima mahasiswa, meskipun persepsi mereka untuk berpartisipasi dalam pilpres cenderung rendah.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan”Apakah ada hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik pada mahasiswa?”

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik pada mahasiswa.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris sehingga Psikologi Sosial dan Psikologi Politik semakin berkembang, khususnya mengenai hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik pada mahasiswa.

1.3.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan memberikan informasi dan referensi untuk meningkatkan partisipasi politik pada mahasiswa dalam hubungannya dengan kepercayaan politik.